

**Judul** : Pemberantasan Terorisme - Pelibatan TNI Berbasis Analisis BNPT  
**Tanggal** : Selasa, 23 Maret 2021  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## PEMBERANTASAN TERORISME

# Pelibatan TNI Berbasis Analisis BNPT

JAKARTA, KOMPAS — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menilai penting pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Namun, seperti yang tertuang di Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, pelibatan TNI hanya dalam kasus-kasus tertentu dan harus didahului persetujuan dari presiden dan DPR. Sebelum persetujuan diberikan, BNPT akan menganalisis ancaman yang ada sebagai bahan pertimbangan persetujuan.

Kepala BNPT Boy Rafli Amar saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Senin (22/3/2021), mengatakan, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme saat ini masih tahap harmonisasi. Selain DPR, pembahasan rancangan perpres tersebut turut melibatkan BNPT.

"Perpres pelibatan TNI ini pada prinsipnya kami mendukung. Dalam kondisi eksisting di lapangan dalam menghadapi terorisme ini sangat dimungkinkan akan menghadapi ancaman berskala tinggi. Contohnya, apabila jaringan terorisme ini menggunakan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang memerlukan perlawanan seimbang. Kita, dengan keputusan politik, tentu mengharapkan TNI menghadapi ancaman yang dihadapi," paparnya.

Karena itu, seperti yang ter-



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

**Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2021). Boy menyampaikan tren radikalisme cenderung turun pada masa pandemi Covid-19. Tren radikalisme di Indonesia turun dari 55,2 persen pada 2017 yang masuk dalam kategori sedang menjadi 38,4 persen pada 2019 (kategori rendah) dan 14 persen pada 2020 (kategori sangat rendah).**

tuang dalam rancangan perpres, pelibatan TNI hanya dalam kasus tertentu atau tidak pada setiap kejahatan terorisme. Kasus tertentu dimaksud adalah ancaman terorisme berskala tinggi. Itu pun harus didahului persetujuan politik presiden dan DPR.

Dalam hal ini, BNPT melalui Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) akan memberikan analisis sebagai bahan pertim-

bangan bagi presiden. Masukan dari BNPT tersebut sekaligus menjadi masukan bagi presiden untuk memutuskan secara tepat satuan TNI yang akan diterjunkan.

Selain itu, menurut Boy, dalam konteks pencegahan, TNI dapat melakukan tugas-tugas intelijen. Kegiatan semacam itu akan menjadi masukan bagi pimpinan lembaga. "Tetapi dalam konteks penindakan harus

ada persetujuan dari Presiden," ujar Boy.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i, mengatakan, DPR telah memberikan persetujuan mengenai pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Sebab, aksi terorisme tidak hanya merupakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam kedaulatan negara. Ha-

nya saja dalam aturan itu harus lebih dijelaskan soal masa pelibatan TNI, apakah akan permanen atau pengerahan hanya berlaku pada satu peristiwa saja.

Adapun anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa, mengingatkan, dalam rancangan perpres, pengerahan TNI hanya atas dasar perintah presiden. Ini dinilai tidak selaras dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengamanatkan pengerahan TNI harus berdasarkan keputusan politik negara. Artinya, keputusan presiden harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR.

## Penangkapan teroris

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rusdi Hartono, Senin (22/3), mengatakan, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap 22 tersangka teroris di tiga wilayah pada 19 Maret lalu. Densus 88 Antiteror menangkap dua tersangka di DKI Jakarta, enam tersangka di Sumatera Barat, dan 14 tersangka di Sumatera Utara.

Menurut Rusdi, penangkapan merupakan pengembangan dari penangkapan 22 tersangka teroris dari kelompok Fahim yang terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah, di Jawa Timur, antara 26 Februari dan 2 Maret lalu. (NAD)